

Komunikasi dan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Elektoral

Titin Setiawati^{1*}, Vilya Dwi Agustini²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta, Indonesia

*titin.setiawati@uhamka.ac.id

Abstract

This research aims to investigate the background of women's participation in general and specifically, women who participate in electoral politics as legislative candidates. Using phenomenological methods, the study states that the backgrounds of women who are involved in electoral politics include following in the footsteps of other people who have already entered the world of politics, wanting women to play more roles, and being encouraged by other people. The participation of women in politics still mostly comes from external sources, rather than being purely driven by a desire to change women's conditions due to patriarchal relations in society. Meanwhile, the most common obstacles experienced by women in politics are the double burden of having to play both domestic and public roles, social and cultural inequality, and being underestimated as women. Regarding the communication strategy used by female legislative candidates, they stated that they communicate more with female prospective voters, explain programs related to women, children, and teenagers, and discuss issues related to women to attract votes. They believe that gender similarity helps them communicate effectively and achieve their political goals.

Keywords: *women political participation; electoral politics; women political strategies;*

Abstrak

Penelitian ini berusaha menggali latar belakang partisipasi perempuan secara umum dan perempuan yang berpartisipasi dalam politik elektoral sebagai calon anggota legislatif. Menggunakan metode fenomenologi, penelitian menyatakan bahwa latar belakang perempuan yang terjun dalam politik elektoral diantaranya adalah: mengikuti jejak orang lain yang sudah terlebih dulu terjun ke dunia politik, ingin perempuan berperan lebih banyak, dan karena dorongan orang lain. Latar belakang partisipasi tersebut masih lebih banyak berasal dari orang lain dan bukan murni keinginan untuk mengubah kondisi perempuan sendiri karena adanya relasi patriarkis dalam masyarakat. Sementara hambatan yang paling banyak dialami adalah adanya beban ganda untuk berperan secara domestik dan publik, ketimpangan sosial dan budaya, dan masih sering dipandang sebelah mata sebagai perempuan. Untuk strategi komunikasi yang dilakukan semua calon anggota legislatif perempuan menyatakan mereka lebih banyak berkomunikasi dengan calon pemilih yang berjenis kelamin perempuan, memaparkan program-program yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan remaja, dan membahas isu-isu yang berkaitan dengan perempuan untuk menarik suara. Mereka beranggapan kesamaan jenis kelamin membantu mereka untuk berkomunikasi dengan efektif dan membantu untuk mencapai tujuan politik.

Kata Kunci: partisipasi politik perempuan; politik elektoral; strategi politik perempuan;

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar. Demokrasi sejatinya adalah keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara demokrasi memiliki ciri yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun dalam partisipasi politik, aspek penting dari

sebuah demokrasi yaitu adanya partisipasi politik (Liando, 2016). Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara (Humairatuzzahrah, 2018). Salah satu proses yang memungkinkan warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan adalah

dengan memilih wakil-wakil yang duduk di parlemen dan akan menyuarakan kepentingan masyarakat, dan dikenal dengan pemilihan umum. Proses pemilihan ini sering disebut dengan politik elektoral.

Elektoral dalam demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemilihan umum (PEMILU) yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memilih wakilnya di parlemen atau kepala pemerintahan (Redaksi VOI.id, 2021). Jika mengacu pada kamus besar Bahasa Indonesia kata elektoral belum terdaftar, tetapi jika mengacu pada Bahasa Inggris *electoral*, dapat diartikan sebagai *connected with elections* (Oxford Learner's Dictionaries, n.d, 2024) atau yang berhubungan dengan pemilu.

Dengan jumlah penduduk sebesar 278,9 juta pada pertengahan tahun 2023 (Annur, 2023), maka peristiwa-peristiwa demokrasi di Indonesia selalu melibatkan jumlah penduduk yang besar. Salah satu peristiwa demokrasi yang melibatkan jumlah penduduk yang besar adalah Pemilihan Umum, peristiwa yang memungkinkan penduduk untuk memilih pemimpinnya secara langsung melalui tempat pemungutan suara yang ada.

Pada pemilu tahun 2024 yang dijadwalkan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024, menurut data dari Komisi Pemilihan Umum, jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 204.807.222 pemilih (Humas KPU, 2023). Pemilih menurut lokasi terbagi menjadi 2 kategori, yaitu pemilih dalam negeri dan pemilih luar negeri. Selain itu data KPU juga menyebutkan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan. Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024 berjumlah 101.589.505 untuk pemilih dalam negeri dan 999.214 pemilih luar negeri. Jika dijumlahkan maka mencapai 102.558.719, hampir seimbang antara jumlah pemilih laki-laki dan perempuan.

Komposisi pemilih laki-laki dan Perempuan dalam pemilu tahun 2024 juga mencerminkan komposisi penduduk Indonesia secara umum. Menurut data BPS,

pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki Indonesia adalah 136,34 juta dan jumlah penduduk perempuan di Indonesia adalah 135,24 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Dengan komposisi kependudukan yang hampir sama, seharusnya tidak ada lagi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang. Tetapi kenyataannya masih banyak perbedaan perlakuan dan kesenjangan yang dialami perempuan, termasuk dalam bidang politik. Dalam sistem politik kita selama ini, kebijakan berlaku menempatkan perempuan hanya sebagai *second person* (Wahyudi, 2018).

Berbagai Upaya dilakukan untuk meningkatkan peran dan partisipasi politik perempuan. Karena keterlibatan Perempuan dalam politik berarti membukakan akses bagi perempuan untuk terlibat dalam penentuan kebijakan publik yang seharusnya seimbang antara kepentingan laki-laki dan perempuan. Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam penjelelasannya, dalam pasal 46 dapat dilihat keterwakilan perempuan sebagai berikut: sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan (Komnasham, n.d, 2024). Selain itu dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga telah disebutkan tentang keharusan keterwakilan perempuan 30 persen dalam daftar calon legislatif. Aturan tentang keharusan caleg perempuan minimal 30% adalah salah satu langkah untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, dan aturan ini tercantum dalam beberapa Undang-Undang, yaitu UU No.31 tahun 2002, UU No.12 tahun 2003, UU No.2 tahun 2008, UU No.10 tahun 2008, dan UU No. 7 tahun 2017(Kiftiyah, 2019). Keterwakilan Perempuan di parlemen memang bukan satu-satunya ukuran keberhasilan perempuan dalam dunia politik, tetapi keterwakilan Perempuan di parlemen akan

mendukung pengambilan keputusan yang lebih mengkomodir kepentingan perempuan.

Angka keterwakilan perempuan di parlemen sendiri meningkat pada Pemilu tahun 2019. Pemilu tahun 2019 mencatat terdapat 188 atau 20,5 persen dari 575 kursi yang diduduki perempuan (Perludem, 2019). Belum mencapai 30 persen dari angka minimal berdasar Undang-Undang tetapi sudah lebih baik. Selama ini karena keterlibatan perempuan yang rendah dalam bidang politik, maka mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan tidak terkomodir dengan baik. Sejumlah keputusan dan kebijakan cenderung berwatak maskulin dan tidak mempertimbangkan dengan baik kepentingan perempuan sebagai warga negara.

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik yang rendah ini diantaranya disebabkan karena secara kultural perempuan ditempatkan dalam ranah domestik, sementara laki-laki ditempatkan dalam ranah publik, dan politik dikategorikan dalam ranah publik. Paling tidak ada 2 hal yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia yaitu agama dan budaya (Kiftiyah, 2019).

Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta (Kemdikbud, n.d, 2024). Sementara partisipasi perempuan dalam politik dapat diartikan sebagai kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi kebijakan public (*public policy*) merupakan bentuk dari sebuah partisipasi politik (Priandi & Roisah, 2019).

Tetapi secara umum partisipasi perempuan dalam politik merupakan kegiatan sukarela perempuan dari berbagai aktivitas seperti pengamat politik, dosen, aktivis perempuan, anggota parlemen dan sebagainya, sehingga para perempuan melibatkan diri secara aktif dalam bidang politik, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan suatu kebijakan (Warjiyati, 2016).

Shaker (2012) menemukan bahwa perempuan lebih berpengetahuan dibanding laki-laki tentang politik lokal. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan kunci tentang bagaimana pengetahuan politik dikonseptualisasikan. Hal ini karena perempuan belum mencapai kesetaraan dalam jabatan terpilih, pertanyaan-pertanyaan tradisional, pertanyaan-pertanyaan tentang pejabat terpilih hampir secara eksklusif berkaitan dengan politikus laki-laki. Perempuan mungkin kurang terbiasa dengan politisi yang berbeda dari mereka secara deskriptif. Dolan menemukan bahwa hal ini juga terjadi pada laki-laki. Di negara-negara bagian yang memiliki senator perempuan, laki-laki kurang mampu menyebutkan nama senator perempuan dibandingkan perempuan; mereka juga cenderung tidak mengetahui persentase perempuan di Kongres (Miller, 2019).

Persoalan akuntabilitas dan representasi merupakan persyaratan yang mutlak bagi terwujudnya demokrasi. Meskipun pada saat ini hak-hak politik kaum perempuan banyak yang telah mendapatkan pengakuan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjamin bahwasannya hak perempuan dalam keikutsertaan pada partisipasi politik telah dipraktikkan sebagaimana mestinya. Dalam konteks kenegaraan Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan laki-laki dan Perempuan termuat dalam; 1) UUD 1945 Pasal 27-34, 2) Ketentuan MPR Nomor II/MPR/1988 dan TAP MPR Nomor II/MPR/1993, 3) Undang-undang (UU No. 1

Tahun 1974 tentang perkawinan, 4) Peraturan Pemerintah (PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 19 tahun 1990 (Kiftiyah, 2019).

UU pemilu No.12/2004 telah mengisyaratkan adanya alokasi minimum sebesar 30% kuota kepada Perempuan untuk menempati posisi legislatif. UU ini merupakan bentuk akomodasi politik atas tuntutan pentingnya kesetaraan gender bagi kalangan Perempuan dalam wilayah politik, sekaligus memberikan ruang partisipasi politik yang lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan bangsa. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan. Kehadiran kuota 30% keterwakilan perempuan ini diharapkan mampu mengeliminasi hal tersebut dan memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat lebih banyak di ranah politik (Mukarom, 2007).

Sebagai wujud bangsa yang menghargai perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tersebut, Indonesia juga memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam setiap rancangan perumusan pelbagai peraturan perundang-undangan. Wujud nyata perlindungan HAM adalah dengan dimasukkannya Bab XA dalam Perubahan Kedua UUD 1945 yang mengatur lebih rinci tentang hak konstitusional warga negaranya. Meskipun ratifikasi konvensi dan jaminan konstitusional HAM telah diberikan oleh UUD 1945, namun yang menjadi permasalahan adalah apa yang sudah dirumuskan di dalam UUD 1945 tersebut di dalam praktek penyelenggaraan negara tidaklah demikian. Kaum perempuan masih saja termarginalkan baik dalam kehidupan rumah tangga, bidang politik, pemerintahan, maupun mendapatkan pekerjaan. Keterlibatan perempuan dan laki-laki di bidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratisasi. Mengaitkan isu gender dengan proses

demokratisasi adalah sesuatu yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, oleh karena didalamnya terintegrasi hak-hak politik bagi laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, peran politik perempuan Indonesia selalu termarginalkan, khususnya dari segi jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Representasi jumlah keterwakilan kaum Perempuan di Lembaga DPR, hanya berkutat di angka 6%-13% sejak periode 1950-2004. Baru pada pemilu tahun 2009, jumlah keterwakilan perempuan di DPR menembus angka 15% yaitu 17,86% atau setara 101 orang anggota DPR perempuan dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang. Maka, untuk mengupayakan kesetaraan peran politik Perempuan dan melindungi hak perempuan di bidang politik tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan melalui UU Nomor 68 Tahun 1958 (UU Hak Politik Perempuan), ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of 1984* (UU CEDAW) dan ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (*Convention on Civil and Political Rights*) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 (Kurniawan, 2023)

Penelitian ini berusaha menggali latar belakang keterlibatan perempuan dalam politik elektoral dengan berbagai cara, mengungkap masalah yang dihadapi, dan strategi komunikasi yang diterapkan perempuan calon anggota legislatif untuk menarik suara pemilih.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk menggali keluasan dan kedalaman informasi dari informan terkait fokus penelitian. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang meneliti kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2020). Sedangkan Creswell menganggap penelitian kualitatif sebagai metode-metode

untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang, penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema umum dan menafsirkan makna data (Jhon. W. Creswell, 2021). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan fenomenologi yang ingin memaknai obyek-obyek sosial dan menjabarkan hasil temuan berdasarkan wawancara mendalam di lapangan.

Menurut Schutz dan Luckmann, fenomenologi sosial dimaksudkan untuk merumuskan ilmu sosial yang mampu menafsirkan dan menjelaskan Tindakan dan pemikiran manusia dengan cara menggambarkan struktur-struktur dasar... realita yang tampak nyata di mata setiap orang yang berpegang teguh pada sikap alamiah (Denzin & Lincoln, 2009). Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana obyek dan pengalaman diciptakan secara penuh makna dan dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam hal ini adalah partisipasi dan strategi komunikasi perempuan yang memilih untuk menjadi bagian politik elektoral

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggali informasi dari 6 orang informan perempuan yang terjun ke dunia politik dan berpartisipasi aktif. Informasi digali dengan mendalam untuk mendapatkan pengalaman subyektif para perempuan yang terjun ke dunia politik dan berbagai hambatan yang dirasakan serta bagaimana perempuan mengatasi permasalahan tersebut. Satu orang informan adalah tim sukses salah satu calon presiden yang sedang berkompetisi pada pemilu 2024, dan 5 orang lainnya adalah anggota dan calon anggota legislatif yang sedang berkompetisi pada pemilu 2024.

Tabel 1. Data informan penelitian

Nama	Partisipasi Politik
Ujiyati	Tim Sukses Capres Pemilu 2024
Ambar	Caleg PKS DPRD Kab. Bogor
Nana	Caleg Golkar Prov. Jateng
Rizda	Caleg PKB Prov. Sulawesi Selatan
Ratu	Anggota DPRD dan Caleg PPP DPRD Kota Tangerang Selatan
Sri	Caleg PPP DPRD Kota Tangerang Selatan

Sumber : peneliti, 2023

Keterlibatan Perempuan dalam politik elektoral secara umum dilatar belakangi oleh berbagai hal. Latar belakang yang pertama adalah keinginan untuk menjadikan perempuan memiliki peran yang lebih banyak karena menganggap secara umum masyarakat membutuhkan perempuan untuk menjadi penggerak perubahan dalam masyarakat. Seperti dinyatakan Ambar dalam wawancara :

“Ketika saya menjadi ketua penggerak PKK di tingkat desa, saya melihat masyarakat sebetulnya sangat membutuhkan perempuan untuk menjadi penggerak perubahan. Saya melihat kondisi masyarakat yang kondisinya kurang baik, misalnya anak-anak kurang gizi yang mengarah ke stunting. Saya menemukan ada ibu muda yang ketika saya tanya hasilnya karena faktor ketidak tahuan dan rendahnya pendidikan. Di sini makanya saya terjun ke sini karena melihat perempuan juga harus berpendidikan, harus berpengetahuan, dan saya ingin mendorong ke sana. Dan saya sudah berdiskusi dengan teman-teman yang sudah lebih dulu menjadi anggota dewan, berpikir bahwa kalau perempuan ada di sana (menjadi anggota dewan) akan lebih berpengaruh. dan saya mendukung pemerintah dengan kuota 30 persen perempuan yang dicanangkan,”(Ambar).

Sementara Ujiyati menyatakan bahwa keterlibatannya pada awalnya adalah karena membantu tokoh politik yang sudah

terlebih dahulu terjun. Seperti pernyataannya sebagai berikut:

“Pada awalnya saya membantu Pak Anies Baswedan di sebuah lembaga. Ketika pemilihan Gubernur DKI saya juga membantunya. Saat itu saya membantu dengan cara survei, jadi mengadakan survei elektabilitas. Kemudian setelah beliau menjadi gubernur DKI saya menjadi tim TGUPP untuk membantu beliau mewujudkan 23 janji kampanyenya. Kemudian ketika Pak Anies dicalonkan menjadi presiden untuk pemilu 2024 oleh partai Nasdem saya juga membantu untuk kegiatan kampanye. Nah dari situ saya terlibat dengan dunia politik,” (Ujiyati).

Sementara Nana menyatakan awal mula keterlibatannya dalam politik karena ditawarkan untuk menjadi caleg oleh partai.

“Awalnya saya hanya diundang untuk menjadi MC di acara yang diadakan partai. Waktu itu Golkar. Diajak karena sebelumnya ada teman yang sudah bergabung dulu dengan Golkar. Dan pada waktu itu ditawarkan untuk menjadi caleg. Setelah berpikir dan mencari tahu lebih lanjut, tahu bahwa Golkar ini ada satuan Perempuan Partai Golkar, tahu bahwa banyak kegiatan tentang perempuan, makanya terus bergabung. Tidak ada unsur kesengajaan sebetulnya,” (Nana).

Rizda menyatakan latar belakang yang berbeda tentang keterlibatannya dalam bidang politik, seperti pernyataannya :

“Meskipun saya sarjana politik sebelumnya saya tidak tertarik untuk terlibat dalam politik. Cuma seiring waktu terus saya sekali-sekali bergabung dengan Golkar. Ketika pemilihan Gubernur, saya terlibat dalam beberapa kegiatan. Nah dari situ lama-lama semakin aktif. Dari kegiatan politik saya belajar untuk memahami manusia. Berpolitik bisa kita bagi menjadi 2, mau idealis atau ikut arus. Kalau saya menempel ke personal sampai saat ini. Saya melihat yang programnya bagus, dia idealis, saya mengikuti tokoh itu,” (Rizda).

Sementara Ratu menyatakan bahwa ia memang sejak berumur 17 tahun sudah terjun ke dunia politik karena menyukai kegiatan organisasi dan mengikuti jejak orang tua yang adalah kader partai dan anggota DPR.

“Saya memang sejak dulu menyukai kegiatan organisasi. Jadi di sekolah juga jadi OSIS, ketua pengajian, dan sebagainya. Pas berumur 17 tahun, tahun 1997 saya langsung masuk ke PPP menjadi pengurus ranting. Jadi memang sejak awal sudah ada semacam kepemimpinan, dan dari dulu ke PPP karena orang tua saya kader PPP militan. Orang tua saya tahun 1997 menjadi caleg PPP Kabupaten Tangerang dan berhasil menjadi anggota Dewan,” (Ratu).

Sementara Sri Handayani menyatakan keterlibatannya dalam dunia politik karena selama bekerja menjadi PNS ia merasa terkekang karena tidak diizinkan untuk berpolitik, maka setelah pensiun ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik setelah mendapat masukan dari rekan-rekannya. Seperti pernyataannya :

“Sewaktu bekerja sebagai PNS kan tidak boleh dukung-mendukung politik, harus netral. Setelah pensiun kembali ke masyarakat, dapat masukan juga dari sahabat-sahabat saya, ya sudah akhirnya ikut terjun dengan menjadi caleg. Banyak yang mendorong saya dengan mengatakan saya kan punya pengalaman di birokrasi jadi ya sudah mencalonkan diri,” (Sri)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa awal mula seorang perempuan berpartisipasi dalam politik elektoral memiliki berbagai sebab dan latar belakang. Untuk sebab mengikuti orang lain baik tokoh lain, teman, atau orang tua adalah latar belakang yang paling banyak diungkapkan, termasuk di dalamnya adalah mengikuti saran sahabat, artinya keputusan untuk terlibat dalam politik tidak murni berasal dari diri sendiri tetapi berasal dari luar diri terutama lingkungan sekitar yang memberi dorongan, dan masukan. Sementara latar belakang lain adalah ingin

mendorong perempuan untuk lebih berperan dalam keluarga dan masyarakat, serta keikutsertaan yang dinyatakan oleh satu orang informan. Meskipun dalam proses pengambilan keputusan tersebut tetap ia bertanya kepada orang yang dianggap lebih mengetahui tentang politik dan sudah terjun ke dunia politik terlebih dahulu.

Perempuan selama ini ditempatkan sebagai *second person* dalam setiap sendi kehidupan. Penempatan sebagai orang kedua dalam masyarakat ini merupakan hal yang telah terjadi selama peradaban manusia tercipta. Hal ini berkaitan dengan bagaimana paham patriarki yang selama ini dianut, diwariskan, dan diteruskan dalam masyarakat masih dianggap sebagai pemahaman yang wajar dan “seharusnya” berlaku.

Patriarki memandang perempuan sebagai anggota masyarakat yang memiliki strata lebih rendah dibanding laki-laki. Dengan adanya budaya patriarki, perempuan berada dalam kekuasaan laki-laki. Perempuan tidak bisa menyampaikan pendapat, pemikiran, dan keinginannya secara terbuka. Komunikasi dan ruang gerak mereka seolah dibatasi dan hanya menjadi obyek dari semua keputusan dan pemikiran laki-laki (Setiawati, 2021).

Dalam konteks latar belakang peran perempuan dalam politik, patriarki juga memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk keputusan perempuan. Alasan untuk berkiprah dalam bidang politik yang berasal dari keinginan pribadi sebagai perempuan untuk memperbaiki situasi yang maskulin dan menjadikan perempuan sebagai warga kelas dua seolah tenggelam jika dibandingkan dengan keputusan untuk berkiprah dalam politik karena dorongan pihak lain atau mengikuti orang lain yang telah lebih dulu bergerak dalam politik. Hanya satu orang informan menyatakan bahwa keterlibatannya dalam politik karena melihat perempuan dibutuhkan untuk perubahan. Sementara empat orang informan menyatakan bahwa

keterlibatannya adalah hasil dari dorongan orang lain atau mengikuti tokoh lain yang sudah terjun ke dunia politik sebelumnya. Dan satu orang informan menyatakan meskipun ia telah menjadi kader partai sejak usia belasan tahun, tetapi keputusannya dipengaruhi oleh orangtuanya terutama ayahnya yang menjadi kader partai yang sama.

Dari hal ini kita dapat melihat bahwa sebagian besar keputusan perempuan dalam politik masih merupakan keputusan yang bukan berasal dari kesadaran untuk memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat melalui politik elektoral. Perempuan terbiasa dengan situasi sosial yang menganggap bahwa perempuan bukan pengambil keputusan yang ideal karena keputusan-keputusan besar, salah satunya politik adalah keputusan yang membutuhkan pemikiran yang panjang dan rasional. Sementara Perempuan selama ini dipandang sebagai makhluk yang tidak rasional dan cenderung menggunakan perasaan. Oleh karenanya keputusan untuk terlibat dalam dunia politik elektoral tidak diambil dengan kesadaran penuh untuk mengubah situasi perempuan yang kurang menguntungkan. Keputusan lebih banyak diambil setelah mendapat masukan dari pihak lain bahkan ada yang menyatakan karena ketidaksengajaan semata. Dari hal ini tercermin bagaimana perempuan yang selama ribaun tahun ditempatkan sebagai warga kelas dua akhirnya juga masih belum bisa melepaskan diri dari berbagai nilai yang ditanamkan oleh masyarakat, dan kesadaran untuk mengubah situasi seolah tidak terpikirkan sejak awal. Hanya Sebagian kecil perempuan yang memikirkan bahwa kiprahnya dalam politik electoral adalah peran untuk mengubah situasi yang kurang menguntungkan menjadi situasi yang lebih baik bagi Perempuan dan masyarakat secara luas.

Sementara untuk hambatan yang dialami selama berperan dalam politik, informan menyatakan bahwa hambatan yang

paling besar adalah peran ganda perempuan yang harus berperan di ranah domestic dan public sekaligus. Peran tersebut harus dilakukan secara bersamaan meskipun kegiatan politik sedang banyak, sehingga membutuhkan kemampuan untuk membagi waktu dengan baik. Seperti pernyataan informan sebagai berikut :

“Perempuan secara budaya dan secara psikologis ada tuntutan untuk menjadi pengelola utama dalam rumah tangga. Seperti misalnya kalau mau pergi ke luar kota untuk hal ini, sementara anaknya baru pulang dari asrama, ya harus ngalah harus ada di rumah. Berbeda dengan laki-laki yang tidak perlu memikirkan hal tersebut, apalagi kalau anaknya masih kecil. Jadi kendalanya lebih ke perempuan yang punya double burden”, (Ujiyati).

“Manajemen waktu, karena bagaimanapun saya kan seorang ibu, dan saya masih menjadi ketua tim penggerak PKK di desa. Selain itu dengan dinobatkan sebagai caleg ada banyak sekali masyarakat yang ingin mengetahui siapa saya, punya apa, bisa menyumbang apa, ingin menyampaikan mereka butuh apa dan sebagainya yang membuat saya harus menemui mereka. Dan semenjak menjadi caleg itu banyak sekali”, (Ambar).

“Kalau di lapangan aku masih menemui dipandang sebelah mata. Beberapa kali yang saya temui kalau sedang di acara yang banyak masyarakat, yang Perempuan biasanya lebu trust, mungkin karena sesama Perempuan. Nah kalau di acara yang audience-nya banyak laki-laki memang sepertinya masih kurang”, (Nana).

“Paling membagi waktu antara kegiatan politik dengan anak-anak. Karena bagaimanapun saya seorang ibu. Kalau dari yang lain-lain keluarga besar tidak ada masalah karena di keluarga saya juga sudah banyak yang terjun ke dunia politik, tetapi lebih ke diri sendiri saja ingin berpolitik tapi juga tetap bisa bersama anak-anak”, (Rizda).

“Bahwasannya tantangan besar yang dihadapi oleh perempuan dalam berpolitik ini pada saat ini masih menempatkan bahwa perempuan yang berpolitik itu mengalami ketimpangan sosial dan budaya. Karena di berbagai penjuru nusantara banyak perempuan yang buta atau bahkan justru dibutakan secara struktural akan potensi diri yang dimilikinya. Sehingga hanya menjalankan peran sekunder saja dalam masyarakat. Jadi, kalau perempuan mendapat kesempatan dan peran yang seimbang dengan laki-laki, maka potensi sumber daya manusia di Tangsel dan juga di Indonesia ini menjadi jauh lebih besar dan juga sangat menguntungkan dan memberi manfaat bagi pembangunan bangsa”, (Ratu).

“Karena memang kita perempuan punya keterbatasan waktu Mungkin ya apalagi kita seorang ibu rumah tangga begitu. Jadi kita punya keterbatasan waktu. Kemudian apakah kita pada saat kita terjun ke dunia politik terutama ya keluarga besar kita terutama suami apakah mengizinkan atau tidak. Dapat izin dulu dari suami Kemudian izin ke keluarga besar. Baik keluarga dari saya maupun keluarga dari suami harus izin dulu Kalau mereka sudah oke mendukung maka baru kita bisa terjun. Kemudian kalau di masyarakat sudah pasti ya. tantangannya banyak, mungkin kalau laki-laki jam berapa saja bisa hadir”, (Sri Handayani).

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa tantangan terbesar yang dihadapi perempuan ketika terjun ke dunia politik elektoral adalah beban ganda yang harus ditanggung perempuan. Berbeda dengan laki-laki yang tidak menanggung beban ganda.

Tantangan terbesar perempuan yang memutuskan terjun ke dunia politik elektoral baik sebagai calon anggota legislatif maupun lainnya bukan tantangan secara politis, tetapi justru berasal dari tantangan non politik yaitu beban ganda yang diberikan kepada perempuan.

Sejak awal peradaban, perempuan memang diberi tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas domestik yang adalah tugas pemeliharaan dalam rumah tangga seperti mengasuh anak, membersihkan rumah, hingga menyediakan makanan. Sementara laki-laki diberi tugas yang secara tegas diposisikan sebagai peran publik yang berada di luar rumah seperti mencari nafkah.

Pembagian peran yang timpang antara laki-laki dan perempuan tersebut membuat laki-laki dapat dengan mudah bepergian tanpa harus memikirkan kondisi domestik yang ditinggalkan karena selama ini peran yang dilekatkan padanya adalah peran yang berada di luar rumah. Sementara Perempuan dilekatkan dengan tugas domestik yang berada di dalam rumah, sehingga apabila perempuan ingin beraktivitas di ranah publik justru mendatangkan peran ganda yang sama-sama harus dipertahankan dalam waktu yang bersamaan.

Ali Latief menyatakan bahwa peran ganda perempuan berarti keterlibatan perempuan secara aktif dalam suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi perempuan yang diorganisir berlandaskan kemampuan yang memadai, serta turut serta memutuskan tujuan. Peran ganda juga membawa dampak pada pergeseran nilai keluarga berupa perubahan struktur fungsional dalam kehidupan keluarga (Humas UNM, 2023).

Peran ganda yang dilakukan perempuan seringkali menimbulkan konflik. Greenhaus dan Beutel mendefinisikan konflik peran ganda sebagai suatu bentuk konflik antar peran dimana tekanan-tekanan dari pekerjaan dan keluarga saling tidak cocok satu sama lain. Seseorang akan menghabiskan waktu yang lebih untuk digunakan dalam memenuhi peran yang lebih penting bagi mereka, oleh karena itu mereka bisa kekurangan waktu untuk peran yang lainnya. Hal ini bisa meningkatkan kesempatan seseorang untuk mengalami konflik peran (Riskasari, 2016).

Dari pernyataan 6 informan semua menyatakan bahwa tantangan terbesar sebagai perempuan adalah konflik peran yang harus dihadapi. Secara kultural perempuan dilekatkan dengan peran domestik sementara aktivitas politik dilekatkan dengan peran publik. Konflik peran yang terjadi pada perempuan yang memutuskan untuk terjun dalam bidang politik sering tidak bisa dielakkan sehingga membutuhkan kemampuan untuk mengatur pembagian peran. Hal ini tidak dihadapi oleh laki-laki yang berperan secara publik semata karena stereotype peran yang dilekatkan pada laki-laki maupun perempuan secara kultural.

Dari 6 orang informan penelitian, 5 diantaranya berperan dalam politik elektoral sebagai caleg (calon anggota legislatif). Mereka berusaha memperoleh suara dan menarik perhatian pemilih dengan beberapa cara. Semua caleg perempuan berusaha membangun komunikasi dengan pemilih mereka secara langsung. Meskipun mereka melakukan kampanye dengan berbagai cara, tetapi mereka berpendapat bahwa berkomunikasi secara langsung dengan tatap muka adalah cara yang paling efektif untuk memengaruhi calon pemilih, sehingga mereka berusaha membangun komunikasi secara langsung. Seperti pernyataan sebagai berikut :

“Saya kalau kampanye lebih ke ibu-ibu. Karena saya juga ketua penggerak PKK. Program saya juga kebanyakan untuk ibu-ibu. Seperti pengentasan gizi buruk yang arahnya ke stunting dari berbagai aspek. Kalau kita bicara stunting harus beberapa sisi. Jadi lebih sering bertemu langsung. Tapi saya juga selalu saya sampaikan juga saya jadi atau tidak masalah karena yak arena Allah saja”, (Ambar).

“Terjun langsung ketemu. Lebih ke perempuan juga. Karena memang saya melihat Golkar peduli dengan isu perempuan dan kesehatan. Makanya bentuk kampanyenya juga penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan. Kalau sesama

Perempuan mungkin lebih percaya”, (Nana).

“Sebagai perempuan kelebihan saya bisa masuk ke berbagai segmen. Saya bisa masuk ke emak-emak dan milenial. Makanya kampanye juga lebih ke situ. Saya berkomunikasi dengan mereka bahwa saya menyuarkan kepentingan mereka. Daripada saya berbicara tentang laki-laki, sudah biasa dan porsinya sudah diambil oleh caleg-caleg laki-laki juga pasti, jadi saya menyuarkan sesuai porsi saya”, (Rizda).

“Ketika kampanye sampai saat ini tidak pernah dapat penolakan. Selalu saya sampaikan bahwa saya memegang idealisme. Maksudnya saya akan selalu berbuat untuk masyarakat, semuanya, itu yang saya sampaikan Ketika kampanye. Itu yang selalu saya sampaikan”, (Ratu Chumaeroh).

“Kita banyak komunitas-komunitas kita kaum wanita, baik itu di majlis taklim, di kegiatan kesehatan, kegiatan kelompok-kelompok tani, kemudian UKM. Terkadang kita agak sungkan menyampaikan sesuatu kepada laki-laki. Ada hal-hal yang mungkin sangat tabu. Tapi kalau sama perempuan, sesama-sama wanita mungkin dia akan menyampaikan. Banyak persoalan-persoalan yang mungkin mereka tabu, mereka tidak mau bicara tapi sebenarnya itu ada di masyarakat. Bagaimana menggunakan pembinaan-pembinaan kepada remaja-remaja juga”, (Sri Handayani).

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa Perempuan-perempuan calon anggota legislatif menggunakan strategi komunikasi dengan mendekati diri pada pemilih perempuan. Mereka biasanya menggunakan pendekatan kepada perempuan dengan menggunakan isu-isu perempuan, berjanji untuk memenuhi aspirasi perempuan, dan menyampaikan program-program yang berkaitan dengan perempuan. Mereka melihat bahwa kesamaan gender dan jenis kelamin

memudahkan mereka untuk berkomunikasi dan menyampaikan materi kampanye.

Dalam masyarakat, komunikasi yang terjadi antar gender masih sering mengalami bias yang menjadikan komunikasi tidak efektif dan nyaman. Akar masalah terjadi komunikasi yang bias gender adalah faktor lingkungan masyarakat yang sengaja mengonstruksi corak berkomunikasi yang berbeda untuk perempuan dan laki-laki. Menjadi seorang perempuan (feminin) atau seorang laki-laki (maskulin) tidak dilahirkan, melainkan dibentuk oleh masyarakat. Demikian pun cara berkomunikasi yang feminin atau maskulin bukan merupakan pembawaan lahir, melainkan sengaja dikonstruksi berbeda oleh masyarakat (Nurhidayah & Nurhayati, 2018).

Perempuan yang menjadi caleg mencoba mengkomunikasikan berbagai program yang berhubungan dengan dunia perempuan kepada *audience* perempuan sebagai upaya kampanye untuk meraih suara. Kampanye kepada perempuan dengan membawa isu perempuan tidak lepas dari pemikiran para caleg perempuan yang merasa bahwa program tentang perempuan lebih spesifik dan membutuhkan pemahaman lebih dari perempuan sehingga komunikasi yang dilakukan diharapkan akan berlangsung efektif dan mampu menjangkau suara.

Selain itu ada anggapan dari para caleg perempuan bahwa menyuarkan program Perempuan dinilai menjadi porsi yang lebih pas karena isu lain yang dianggap sebagai isu umum dianggap sebagai isu yang sudah banyak dibahas oleh caleg laki-laki, sehingga mereka membatasi pada isu Perempuan.

Pemahaman bahwa masalah perempuan hanya untuk perempuan sebenarnya berkaitan juga dengan konstruksi gender yang ada dalam masyarakat. Bahkan sejak awal perempuan dan laki-laki dipercaya akan melakukan cara-cara komunikasi yang berbeda.

Menurut Freud dan Erikson, corak komunikasi perempuan dan laki berbeda sesuai dengan genitalia yang dimilikinya. Laki-laki cenderung berbicara mengarah ke luar, ke masa depan, kepada hal yang lebih makro, dengan penuh keberanian dan *confidence*, bahasanya lugas dan tegas, langsung, tidak berbelit, tidak berbasu-basi, tidak mempertimbangkan perasaan lawan bicara, objektif, ekspresif, dan lantang, sesuai dengan genitalia yang mengarah keluar sebagai simbol agresif dan ekspresif. Sebaliknya, perempuan berbicara dengan intonasi suaralembut, penuh pertimbangan terhadap emosi lawan bicara, dengan bahasa yang dikemas lebih santun, dan terkadang penuh keraguan, subjektif, tidak langsung, berbelit-belit, berorientasi ke dalam, kepada masalah detail, kurang urgen, praktis, dan mengarah ke dalam atau penuh empati, sesuai dengan genitalia ke dalam dan berliku (Nurhidayah & Nurhayati, 2018). Meskipun Erikson juga menyatakan bahwa pola pengasuhan akan berpengaruh kepada cara berkomunikasi seseorang.

Dari hal ini kita melihat bahwa cara berkomunikasi yang diambil oleh caleg perempuan sesuai dengan pemahaman bahwa Perempuan memiliki pola komunikasi yang berbeda dengan laki-laki, dan kesadaran ini kemudian menimbulkan pemahaman bahwa caleg perempuan akan berpengaruh pada audience Perempuan sehingga cara ini diambil untuk mengumpulkan suara dukungan pada caleg Perempuan.

SIMPULAN

Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang komunikasi dan peran politik perempuan dalam politik elektoral. Secara garis besar perempuan yang terjun dalam dunia politik elektoral memiliki beberapa latar belakang yang berbeda, meskipun secara umum masih menyatakan bahwa peran politik mereka dalam adalah karena dorongan dari pihak luar, bukan dari diri sendiri dan hanya satu orang informan yang

menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam politik elektoral karena kesadarannya tentang peran perempuan dalam masyarakat.

Perempuan yang berperan dalam politik elektoral masih menemui berbagai masalah. Masalah utama yang dihadapi bukan berasal dari lawan politik tetapi justru dari dalam struktur keluarga dan diri mereka yang sering mengalami konflik peran antara peran domestik dan peran publik yang diemban. Sementara dalam strategi komunikasi caleg perempuan lebih memilih berkomunikasi dengan *audience* perempuan dengan membawa program perempuan karena menyadari bahwa pola komunikasi laki-laki dan perempuan berbeda, dan cara efektif mendapatkan suara adalah dengan menyampaikan program tentang perempuan kepada sesama perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023, July 13). *Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa Hingga Pertengahan 2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2021*.
- Denzin, N. K., & Lincoln, S. Y. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (Bahasa Ind). Pustaka PELajar.
- Humairatuzzahrah, N. (2018). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perkembangan Demokrasi . *Buletin Hukum Dan Keadilan Adalah*, 2(1d).
- Humas KPU. (2023, July 2). *DPT Pemilu 2024 Nasional, 204,8 Juta Pemilih*.
- Humas UNM. (2023, May 31). *Peran Ganda Perempuan Menciptakan Pergeseran Nilai Dalam Keluarga*.
- Jhon. W. Creswell. (2021). *Research Design* (V). Pustaka Pelajar.
- Kemdikbud. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Kiftiyah, A. (2019a). *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*. 1–13. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp1-13>

- Kiftiyah, A. (2019b). *Perempuan Dalam Partisipasi Politik Indonesia*. 6(2), 55–72.
- Komnasham. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Kurniawan, N. (n.d.). *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2).
- Miller, M. K. (2019). Who Knows More About Politics? A Dual Explanation for the Gender Gap. *American Politics Research*, 47(1), 174–188. <https://doi.org/10.1177/1532673X18803890>
- Mukarom, Z. (2007). *Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif*. 1984(56), 257–270.
- Nurhidayah, Y., & Nurhayati, E. (2018). *Psikologi Komunikasi Antar Gender*. Pustaka Pelajar.
- Oxford Learner's Dictionaries. (n.d.). *Electoral*.
- Perludem. (2019, August 31). *Perludem: Keterwakilan Perempuan Dalam Pileg 2019 Terbanyak Sepanjang Sejarah*.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1).
- Redaksi VOLid. (2021, April 7). *Meninjau Politik Elektoral: Pengertian, Dampak, Sejarah, dan Contoh-contohnya*.
- Riskasari, W. (2016). Konflik Peran Ganda Wanita Berkarir. *Al Qalb Jurnal Psikologi Islam*, 7(2), 74–82.
- Setiawati, T. (2021). Representasi Patriarki Dalam Film Istri Orang. *Komunika*, 7(2), 66–76.
- Sugiyono. (2020). *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi* (cetakan ke). Alfabeta.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–68.
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Al Daulah*, 6(1).